



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN**

Jalan Taman Siswa No 1 Telp 81000-21108-23172 Fax (0751) 26842 Padang
<http://www.sumbar.go.id>-e-mail:pdeisb@sumbar.go.id

**PENYEMPURNAAN RENCANA KERJA
(RENJA)**

**DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN
PERMUKIMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017**





KATA PENGANTAR

Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2016 ini meyusun Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 yang merupakan acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan serta acuan untuk penetapan kinerja pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman dengan mengacu kepada :

1. 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Propinsi Sumatera Barat Tahun
2. Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat
3. Program dan Kegiatan untuk pencapaian target dalam RPJMD Propinsi Sumatera Barat

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat diharapkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian target kinerjanya baik dalam penetapan kebijakan, sasaran dan skala prioritas pembangunan.

Padang, Mei 2016
Kepala Dinas

Ir. Suprpto, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19561219 198511 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

1. Rencana Program dan Kegiatan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen tahunan Rencana Kerja (Renja) SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat serta memuat indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju.

Karena itu Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2017 yang mengacu kepada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi serta berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebatas tidak melanggar kewenangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
18. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
19. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor Nomor 5 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2015
20. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 105 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Pemukiman Provinsi Sumatera Barat

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat adalah memberikan arah dan panduan perencanaan kepada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk pelaksanaan tahun anggaran selanjutnya. Serta sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat adalah :

1. Menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun selanjutnya.
2. Menjadi acuan seluruh bidang/unit-unit kerja di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi telah ditetapkan.
3. Menjadi acuan dalam menilai pencapaian kinerja bidang/unit-unit kerja di Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat yang kemudian akan berakumulasi menjadi pencapaian kinerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat secara keseluruhan.
4. Menjadi acuan bagi Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat dalam mempertanggung-jawabkan akuntabilitas kinerjanya.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Renja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015 dan perkiraan capaian tahun 2016, yang mengacu kepada APBD tahun berjalan serta mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Renstra SKPD

Kinerja program dan kegiatan dievaluasi terhadap aspek fisik maupun keuangan dengan memperhatikan realisasi fisik maupun keuangannya. Hasil evaluasi rata-rata persentase pencapaian kinerja fisik pada tahun anggaran 2015 ini adalah 97,66% sedangkan capaian kinerja keuangan 94,50 %.

Pencapaian Kinerja Fisik Per-Program

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	Fisik		Kinerja
			Rencana	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.207.317.530	100	100	Sangat baik
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.146.683.000	100	95.63	Sangat baik
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	268.595.000	100	100	Sangat baik
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	229.648.000	100	100	Sangat baik
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1.557.729.650	100	100	Sangat baik
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi dan Strategis Provinsi	305.555.231.183	100	96.85	Sangat baik
7	Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan	64.329.190.509	100	98.07	Sangat baik
8	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke PU an	2.830.492.650	100	100	Sangat baik
9	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	3.725.869.190	100	100	Sangat baik
10	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	117.737.418.520	100	100	Sangat Baik
11	Program Bimbingan Teknis Peningkatan Jasa Kontruksi	1.761.088.570	100	100	Sangat Baik
12	Program Peningkatan Kerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	5.685.000.000	100	78.72	Baik

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	Fisik		Kinerja
			Rencana	Realisasi	
13	Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	200.000.000	100	100	Sangat baik
14	Program Pengembangan Perumahan	1.197.364.850	100	100	Sangat baik
15	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	4.493.534.200	100	100	Sangat baik
16	Program Perencanaan Tata Ruang	4.610.253.500	100	100	Sangat baik
17	Program Pengaturan dan Pengawasan Penataan Ruang	360.571.000	100	100	Sangat baik
18	Program Pembinaan Penataan Ruang	385.240.750	100	100	Sangat baik
19	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	219.752.820	100	100	Sangat baik

Hasil evaluasi capaian kinerja fisik terhadap 19 (sembilan belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 18 (delapan belas) program yang berkinerja Sangat baik, dan 1 (satu) program yang berkinerja baik.

Tabel Pencapaian Kinerja Keuangan Per-Program

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	Keuangan		Kinerja
			Rencana	Realisasi	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.207.317.530	100	95.66	Sangat baik
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.146.683.000	100	95.63	Sangat baik
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	268.595.000	100	99.96	Sangat baik
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	229.648.000	100	94.06	Sangat baik
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	1.557.729.650	100	97.36	Sangat baik
6	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi dan Strategis Provinsi	305.555.231.183	100	94.06	Sangat baik
7	Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan	64.329.190.509	100	93.50	Sangat baik
8	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke PU an	2.830.492.650	100	99.7	Sangat baik

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA (Rp.)	Keuangan		Kinerja
			Rencana	Realisasi	
9	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	3.725.869.190	100	99.2	Sangat baik
10	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	117.737.418.520	100	95.5	Sangat Baik
11	Program Bimbingan Teknis Peningkatan Jasa Kontruksi	1.761.088.570	100	96.00	Sangat Baik
12	Program Peningkatan Kerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase	5.685.000.000	100	78.72	Baik
13	Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	200.000.000	100	25.00	Gagal
14	Program Pengembangan Perumahan	1.197.364.850	100	84.50	Sangat baik
15	Program Pemberdayaan Komuntas Perumahan	4.493.534.200	100	98.90	Sangat baik
16	Program Perencanaan Tata Ruang	4.610.253.500	100	99.52	Sangat baik
17	Program Pengaturan dan Pengawasan Penataan Ruang	360.571.000	100	99.27	Sangat baik
18	Program Pembinaan Penataan Ruang	385.240.750	100	97.01	Sangat baik
19	Urusan Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	219.752.820	100	96.17	Sangat baik

Hasil evaluasi capaian kinerja keuangan terhadap 19 (sembilan belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 17 (tujuh belas) program yang berkinerja Sangat baik, 1 (satu) program yang berkinerja baik dan 1 (satu) program yang berkinerja gagal, hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

Adapun program dan kegiatan yang realisasi fisik atau keuangan program/kegiatan tidak mencapai 100% beserta penyebab rendahnya realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kendala / Permasalahan pada Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang Dan Permukiman Tahun Anggaran 2015

NO	JENIS PROGRAM/ KEGIATAN	PENYEBAB RENDAHNYA REALISASI
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat (61,36 %) Fisik : 100 %	Sisa anggaran sebesar 38,64% disebabkan penghematan, Surat - surat dimana sebagian sudah memakai Elektronik dan email
2	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan (86,47 %) Fisik : 100%	Efisiensi Anggaran
3	Koordinasi, Fasilitasi, dan Singkronisasi Program Reformasi (84,73 %) Fisik : 100%	Efisiensi Anggaran
4	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi (85,73) Fisik : 100%	Efisiensi Anggaran
5	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi (86,67) Fisik : 100%	Sisa Tender
6	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD (88,66) Fisik : 100%	Efisiensi Perjalanan Dinas
7	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat (76,97) Fisik : 85%	2 Paket yang muncul pada APBDP gagal lelang yaitu 1. Study Pemanfaatan TPA Regional, 2. Dokumen Lingkungan Gedung Konvention Hall
8.	Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah I (0%)	Masyarakat Menolak Nilai Ganti Rugi yang ditetapkan oleh Tim Appraisal
9.	Pembangunan Jembatan Strategis Wilayah II (48,44) Fisik : 81,46 %	Paket Jembatan Batu Rijal terkena banjir bandang
10.	Peningkatan Jalan Propinsi (DAK) (67,59) Fisik : 72,5 %	Lahan tidak bebas, Upaya denda Maksimal 50 hari lewat tahun anggaran
11.	Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten Solok Selatan Peningkatan Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1) Paket I (26,40%) Fisik : 32,14 %	Muncul pada APBDP, waktu tidak mencukupi, dan Denda maksimal 50 hari lewat tahun anggaran
	Pembangunan Jalan Provinsi dan Strategis Provinsi di Wilayah Kabupaten Solok Selatan Peningkatan Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1) Paket II (86,47 %) Fisik : 94,08 %	
12.	Studi Kelayakan Program Pengembangan Jaringan Jalan Provinsi (74,43%) Fisik : 100%	Efisiensi Anggaran

NO	JENIS PROGRAM/ KEGIATAN	PENYEBAB RENDAHNYA REALISASI
13.	Pengendalian Pelaksanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (82,2%) Fisik : 100%	Efisiensi Perjalanan Dinas
14.	Penanganan Kondisi Kritis Jalan dan Jembatan (0%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kekurangan adm. Dalam proses pengadaan pemilihan penyedia jasa yang menggunakan metode penunjukkan langsung. 2. Sebagian fisik pekerjaan sudah tidak ada lagi dipekerjaan dan sudah tertimbun tanah sehingga menyulitkan dalam melakukan pengukuran fisik pekerjaan. 3. Dengan demikian pembayaran pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana alam di ruas Jalan Lubuk Selasih - Surian pada tahun 2010 dan diruas jalan Sicincin - Malalak Balingka pada tahun 2011 belum bisa di bayar.
15.	Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Bidang Peralatan dan Bahan Jalan Provinsi Sumatera Barat (88,85%) Fisik : 100%	Sisa Tender
16.	Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat (86,98%) Fisik : 100%	Optimalisasi
17.	Pengawasan Bangunan Gedung (83,78%) Fisik : 100%	Pengawasan berkala tidak bisa dicairkan, karena Konsultan Perencana tidak berada dilokasi
18.	Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah Regional (59,35%)	Gaji 13 untuk Tenaga Harian Lepas tidak bisa dibayarkan karena tidak ada Peraturan Gubernur yang mendukung dan Gaji Tenaga Pemilah yang diusulkan sebesar Rp. 200 Juta tidak dapat dibayarkan karena pemilah sudah berhenti semenjak bulan Agustus 2015.
19.	Peningkatan Infrastruktur Tempat Pembuangan Sampah Regional (0%)	ATPM (Anggota Tanda Pemegang Merek) tidak sanggup menawar dalam 1 bulan , jadi gagal penunjukkan
20.	Pendampingan Bidang Teknis Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP dan AMPL) (25,00%) Fisik : 100%	Banyaknya Rapat ditingkat Propinsi, sehingga Monitoring ke Daerah sedikit dilakukan.
21.	Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS - IDB) (Pendamping) (25%)	Persetujuan LOAN terlambat ditandatangani, baru mulai akhir bulan Oktober 2015
22.	Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat (89,89%) Fisik : 100%	Efisiensi Anggaran

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk pencapaian target indikator kinerja terhadap masing-masing sasaran pada Dinas Prasarana Jalan, Tata ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat diatas didukung oleh beberapa program terkait. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang mendukungnya. Terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan-kegiatan.

Evaluasi kinerja merupakan analisa terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja terhadap target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya pada Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja Dinas Prasarana Jalan, Tata ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2016 dituangkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2014 Propinsi Sumatera Barat pada bulan Februari 2015. Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman, maka diperoleh hasil capaian terhadap target indikator kinerja sebagai berikut:

Adapun sasaran Indikator Kinerja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kemantapan Jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	89,50%
2.	Meningkatnya penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara	a. Persentase Peningkatan Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik	57,69%
		b. Persentase Pemenuhan Rumah Negara dalam kondisi baik	1,23%
3.	Meningkatnya penyediaan Perumahan dan Permukiman yang berbasis Kawasan Layak Huni	Persentase Perumahan Layak Huni dan Kawasan Permukiman	74,11%
4.	Meningkatkan Keterpaduan Penataan Ruang Wilayah	Persentase Kabupaten / Kota yang Penataan Wilayahnya sesuai dengan Penataan Wilayah RTRW Provinsi	95%

Sasaran pertama adalah Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi merupakan salah satu Sasaran Strategis Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat yang mendukung Kinerja Pemerintah Provinsi. Target Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tercapainya sasaran tersebut adalah dengan tercapainya Kemantapan Jalan Provinsi dengan target Kinerja Kemantapan Jalan Provinsi sebesar 89,50 %. Adapun realisasi yang dicapai sepanjang tahun 2015 adalah tingkat kemantapan jalan sebesar 91,13 %, dan terjadinya peningkatan dari tahun 2014 sebesar 2,93 %. dari tingkat kemantapan jalan 88,20 %. Adapun anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat untuk program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Provinsi dan Strategis Provinsi dan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan adalah sebesar Rp. 369.884.421.692,- dengan realisasi sebesar Rp. 347.401.130.390,- (93,92 %).

Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2015

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Meningkatnya Kemantapan Jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	89,50	91,13	101,82	Sangat Baik

Indikator Outcome	Indikator Output	Rencana Target		Realiasi	
		2011 s/d 2015	2015	2011 s/d 2015	2015
Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (Target 89,5%)	a1 Panjang jalan yang di tingkatkan (km)	142	24	165,986	47,986
	a2 Panjang Jalan yang di rehab (km)	5.373	1.143	5.373	1.143
	a3 Panjang jembatan yang ditingkatkan (m)	355	165	220	30
	a4 Panjang jembatan yang direhab (m)	848	145	849	146
	a5 Panjang Jalan Yang di bangun (Km)	177	27	164,303	14,303
	a6 Panjang jembatan yang di bangun (m)	1.853	225	1.688	60

Dalam mencapai keberhasilan mempertahankan Kemantapan Jalan Provinsi untuk tetap mantap, Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat didukung oleh :

1. Ketersediaan dana APBD Provinsi Sumbar untuk pembangunan jalan dan jembatan.
2. UPTD Balai Pengujian Mutu Bahan dan Pekerjaan yang sudah mempunyai Sertifikat Akreditasi sejak tanggal 15 Maret 2012.
3. Unit Layanan Gangguan yang siap 24 jam untuk mengatasi bencana alam terdapat pada Rehab / Pemel yang tersebar di 18 Kabupaten / Kota.
4. Pengawasan dari atasan langsung.
5. Rehab / Pemel yang setiap tahunnya menjaga kemantapan jalan dengan panjang jalan yang dipelihara sepanjang 1.143 km.

Sasaran ke-2 adalah Persentase Peningkatan Cakupan Layanan Perumahan, Permukiman dan Bangunan Gedung.

Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2015 mempunyai Indikator Kinerja yaitu Persentase Peningkatan Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik dari target 57,69 % teralisasi menjadi 57,69 % (100 %) target untuk tahun 2015 adalah sebanyak 12 paket kegiatan bangunan gedung dan teralisasinya sebanyak 12 paket kegiatan bangunan gedung. Klasifikasi Penilaian untuk Persentase Peningkatan Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik untuk tahun 2015 adalah predikat Sangat Baik.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGE T	REALISA SI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyediaan Gedung Negara dan Rumah Negara	Persentase Peningkatan Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik	57,69	57,69	100,00
	Persentase Pemenuhan Rumah Negara dalam kondisi baik	1,23	1,23	100,00

Indikator Out Come	Indikator Out Put	Target		Realisasi	
		2011 sd 2015	2015	2011 sd 2015	2015
Persentase Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik (57%)	a 1 Jumlah bangunan gedung negara yang di bangun (unit)	20	12	20	12
	a 2 Jumlah bangunan gedung negara yang di rehab/retrofit (unit)	7	-	7	-
Persentase Pemenuhan Rumah Negara dalam kondisi baik (95%)	b 1 Jumlah rumah negara yang terbangun (unit)	10	7	6	3
	b 2 Jumlah rumah negara yang di rehab (unit)	4	2	2	2
Persentase Rumah Layak Huni dan Kawasan Permukiman (0,93%)	a 1 Pembangunan Rumah Layak Huni (unit)	3.500	213	3.467	-

A. Meningkatnya Penyediaan Gedung Negara

Adapun Persentase Peningkatan Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik dari target 57,69 % teralisasi menjadi 57,69 % (100 %) target untuk tahun 2015 adalah sebanyak 12 paket kegiatan bangunan gedung dan teralisasinya sebanyak 12 paket kegiatan bangunan gedung. Klasifikasi Penilaian untuk Persentase Peningkatan Pemenuhan Gedung Negara dalam kondisi baik untuk tahun 2015 adalah predikat Sangat Baik.

B. Meningkatnya Penyediaan Rumah Negara.

Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2015 mempunyai Indikator Kinerja yaitu Persentase Peningkatan Pemenuhan Persentase Pemenuhan Rumah Negara dalam kondisi baik dari target 1,23 % teralisasi menjadi 1,23 % (100 %) = $4 / 326 \times 100 = 1,23 \%$.

Sasaran ke-3 adalah Meningkatnya Penyediaan Perumahan dan Permukiman yang Berbasis Kawasan Layak Huni

Salah satu sasaran strategis Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatnya jumlah perumahan dan permukiman masyarakat. Secara lebih rinci, berikut indikator kinerja, target dan realisasi Sasaran Strategis mengenai Perumahan Layak Huni dan Kawasan Permukiman.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya penyediaan Perumahan dan Permukiman yang berbasis Kawasan Layak Huni	Persentase Perumahan Layak Huni dan Kawasan Permukiman	74,11	74,05	99,91

Adapun Perbandingan Rumah Layak Huni di Provinsi Sumatera dari Tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun	Rumah Layak Huni (Unit Rumah)
2011	752.642
2012	858.544
2013	862.195
2014	913.114
2015	913.114

Dari seluruh total rumah di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 1.233.607 unit rumah, terdapat Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 320.000 unit rumah, Rumah Layak Huni sebanyak 913.607 dan terdapat penambahan tahun 2015 sebanyak 630 unit rumah. Dengan bertambahnya Rumah Layak Huni 2015 sebanyak $630 + 913.607 = 914.237$ unit rumah. Adapun persentase Rumah Layak Huni target 2015 adalah 74,11 %

Dengan keluarnya Tanggapan Evaluasi Mendagri Nomor : 903 – 4792 tahun 2015, Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni dibatalkan sebanyak 630 unit rumah, sehingga hanya dihitung tahun 2014 saja sebanyak $913.607/1.233.607 = 74,05$ %. Sehingga, berdasarkan Renstra dari tahun 2011 s/d 2015 sebanyak 3500 unit rumah tidak layak huni, yang teralisasi baru 3.467 unit rumah tidak layak huni = 99,05 %.

Terkait peningkatan penyediaan Rumah dan Kawasan Permukiman yang Berbasis Kawasan Layak Huni, beberapa hal yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut :

1. Prosentase Perumahan Layak Huni dan Kawasan Permukiman Pengurangan rumah tidak layak huni sebanyak 3500 unit dalam jangka waktu 5 tahun (2010 – 2015).
2. Cakupan pelayanan air minum terhadap jumlah penduduk (realisasi 2010 : 55 % , rencana 2015 : 70 %) Penambahan 15 % cakupan pelayanan dilaksanakan dalam rentang waktu 2010-2015.
3. Cakupan pelayanan air limbah terhadap jumlah penduduk Target 78 % cakupan pelayanan air limbah terhadap jumlah penduduk pada akhir 2015 yang sesuai dengan master plan dilaksanakan rentang waktu 2010 – 2015.
4. Porsentase berkurang kawasan genangan air, Target berkurangnya kawasan genangan air sebesar 70 % sesuai dengan master plan dalam rentang waktu 2010 – 2015.
5. Tersedianya pelayanan TPA Regional dan Lokal Target 100 % untuk terpenuhinya pelayanan 2 unit TPA Regional (Kota Payakumbuh dan Kota Solok) serta 9 unit TPA lokal yang tersebar di Kabupaten/Kota.
6. Tersedianya pelayanan pengelolaan sampah skala kawasan (3 R) Target 70 % atau terbangunnya 31 lokasi unit pelayanan pengelolaan sampah skala kawasan (3 R) dalam rentang waktu 2010 – 2015 yang kawasannya tersebar di Kota/Kabupaten sesuai dengan master plan pengolahan sampah di Kota / Kabupaten.

Sasaran ke 4 (empat) adalah Meningkatnya Keterpaduan Penataan Ruang Wilayah**a) Persentase Tersedianya Perencanaan Tata Ruang dan Perda RTRW**

Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2015 mempunyai Indikator Kinerja yaitu Persentase Kabupaten / Kota yang Penataan Wilayahnya sesuai dengan Penataan Wilayah RTRW Provinsi dari target 95 % teralisasi menjadi 100 % (105,26 %) target untuk tahun 2015 adalah 1 (satu) Perda RTRW Kabupaten Mentawai dan teralisasinya sebanyak 1 (satu) Peraturan Daerah RTRW.

Klasifikasi Penilaian untuk Persentase Kabupaten / Kota yang Penataan Wilayahnya sesuai dengan Penataan Wilayah RTRW Provinsi untuk tahun 2015 adalah **predikat Sangat Baik**.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Keterpaduan Penataan Ruang Wilayah	Persentase Kabupaten / Kota yang Penataan Wilayahnya sesuai dengan Penataan Wilayah RTRW Provinsi	95,00	100,00	105,26

Pencapaian indikator kinerja yang melebihi target ini disebabkan karena terselesaikannya Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7 tahun 2015, sehingga capaian realisasi target 2015 menjadi 105,26 %

b) Prosentase RTR Kawasan Strategis

Kawasan strategis, merupakan kawasan yang diprioritaskan pengembangannya, kawasan strategis ini terdiri atas :

- Kawasan strategis yang didasari oleh penetapan melalui PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),
- Kawasan strategis merupakan hasil perumusan dan kesepakatan Pemerintah Provinsi.

Sebagai acuan dalam penetapan kawasan strategis telah dikeluarkan kriteria, yang dapat digunakan untuk kepentingan penetapan kawasan strategis provinsi, kecuali kawasan strategis untuk pertahanan dan keamanan negara karena merupakan kepentingan terbatas. Kawasan strategis lainnya adalah :

1. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi,

Penetapan kawasan strategis provinsi dari sudut pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- Memiliki potensi ekspor;
- Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
- Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional; atau
- Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Sedangkan didasari analisa yang bertumpu kepada peluang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, kawasan strategis diwilayah provinsi Sumatera Barat terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis ITBM (Indarung – Teluk Bayur – Bungus –Mandeh)
- b. Kawasan Industri (KI)
- c. Kawasan Strategis Poros Barat – Timur (Jalur Padang – batas Prov. Riau)
- d. Kawasan Strategis Tapus, Rao dan Mapat Tunggul
- e. Kawasan Strategis Sungai Rumbai
- f. Kawasan Strategis Lunang Silaut
- g. Kawasan Strategis Pangkalan Koto Baru
- h. Kawasan Strategis Kamang Baru
- i. Kawasan Strategis Abai Sangir-Taluak Aie Putih
- j. Kawasan Strategis Silaping

2. Kawasan strategis sosial budaya,

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan dengan kriteria:

- Merupakan tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya nasional;
- Merupakan prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya serta jati diri bangsa;

- Merupakan aset nasional atau internasional yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- Merupakan tempat perlindungan peninggalan budaya nasional;
- Memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- Memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skala nasional.

Didasari analisa yang bertumpu kepada sosial budaya, kawasan strategis diwilayah provinsi Sumatera Barat adalah Kawasan Strategis Budaya Batu Sangkar Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya.

3. Kawasan strategis pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi, Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan ditetapkan dengan kriteria:

- Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem;
- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air;
- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup

Didasari analisa yang bertumpu kepada fungsi dan daya dukung lingkungan, kawasan strategis diwilayah provinsi Sumatera Barat terdiri atas :

- a. Kawasan Strategis Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi
- b. Kawasan Strategis Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar
- c. Kawasan Strategis Danau Maninjau di Kabupaten Agam
- d. Kawasan Strategis Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang di Kabupaten Solok

4. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan

- a. Kawasan Strategis Ngarai Sianok di Kota Bukittinggi
- b. Kawasan Strategis Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar
- c. Kawasan Strategis Danau Maninjau di Kabupaten Agam
- d. Kawasan Strategis Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang di Kabupaten Solok

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan telaahan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat, dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis Pembangunan Infastruktur bidang Ke PU-an dan permukiman yang penyelenggaraan menjadi tanggung jawab Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman adalah sebagai berikut;

Isu-Isu Strategis Prasarana Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Barat

1. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan, baik secara berkala maupun akibat bencana alam (gempa, longsor dsb). Pengembangan jalan dengan orientasi kebencanaan seperti Mitigasi Jalan evakuasi dan Kontruksi Jalan yang lebih tahan lama.
2. Peningkatan kapasitas jalan menuju tempat strategis seperti Pelabuhan Teluk Bayur, Bandara Internasional Minangkabau, sentra-sentra produksi (termasuk hinterland) dan kawasan destinasi pariwisata.
3. Peningkatan kapasitas di Kota Padang, sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat untuk mendukung Kota Padang sebagai kota metropolitan
4. Peningkatan kapasitas jalan evakuasi Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah pesisir pantai untuk mitigasi bencana
5. Berikut adalah program-program pembangunan jalan yang menjadi prioritas;
 - a. Sicicin-Malalak, untuk Menghindari kemacetan Sicincin – Padang Panjang -Padang Luar – Bukittinggi.
 - b. Malalak-Balingka - Jembatan Ngarai - Bukittinggi sebagai kelanjutan Sicincin- Malalak
 - c. Duku-Sicincin (jalan baru) untuk mendukung Pengembangan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman yang baru serta mengatasi kemacetan lalu lintas.
 - d. Alahan Panjang-Pasar Baru, untuk mengurangi beban arus lalu-lintas Kota Padang-Kab. Solok-Kab. Pesisir Selatan—Solok Selatan, dan akan dilanjutkan dengan pembangunan jalan Jalan Alahan Panjang—Kiliran Jao untuk jalur alternative Ke Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya
 - e. Jalan Kab. Pasaman—Bts Provinsi Riau (Jalan Rao –Rokan).
 - f. Jalan penghubung Kab. Solok Selatan dan Kab. Dharmasraya.
 - g. Jalan penghubung Kab. Pasaman—Kab. Pasaman Barat.

Isu-Isu Strategis bidang Infastruktur Permukiman di Provinsi Sumatera Barat

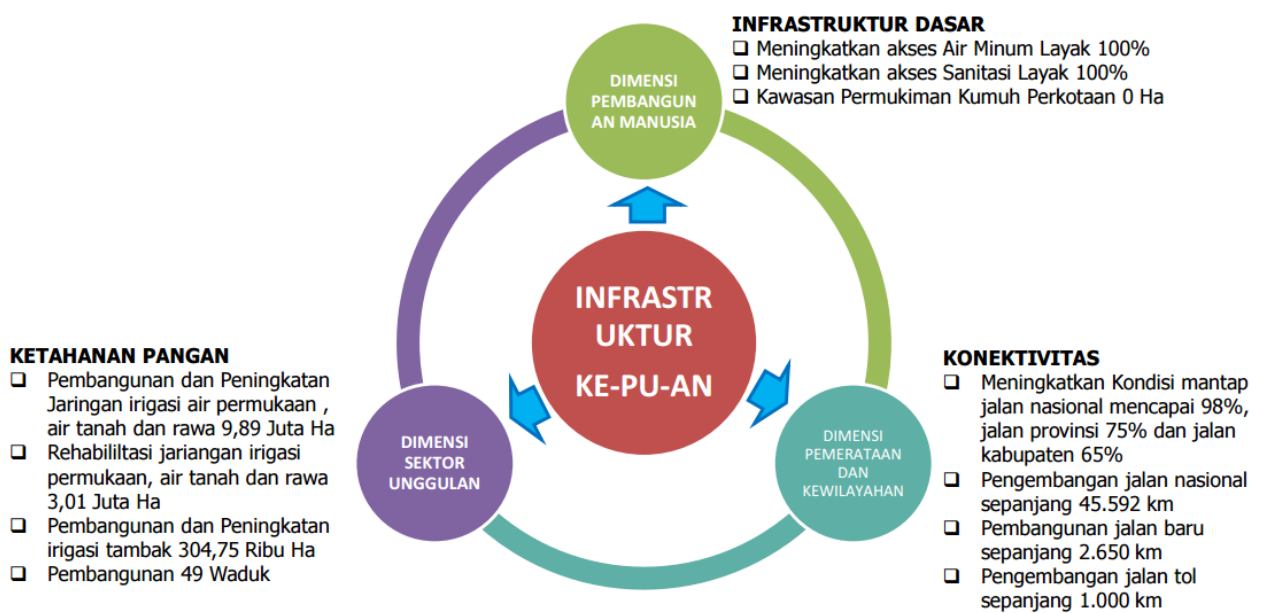
1. Isu Strategis Pembangunan Pengembangan Air Minum
 - a. Menurunnya kuantitas dan kuantitas air baku yang dipergunakan dalam sistem pelayanan air minum.
 - b. Masih rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Isu Strategis Pengembangan Permukiman
 - a. Pengembangan permukiman baru
 - b. Peningkatan kualitas permukiman
 - c. Penanggulangan bencana alam pada kawasan permukiman
 - d. Pembangunan Rusunawa pada kawasan padat penduduk
 - e. Penyediaan prasarana dan sarana di perdesaan terutama mendukung kawasan agropolitan
 - f. Percepatan pembangunan prasarana dan sarana pada perdesaan tertinggal.

3. Isu Strategis Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL)
 - a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Rumah Negara, terutama rehabilitasi Bangunan dan Rumah Negara yang rusak akibat bencana alam
 - b. Peningkatan Kualitas Lingkungan Kawasan Tradisional/Bersejarah di Provinsi Sumatera Barat
4. Isu Strategis Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP)
 - a. Drainase
 - Kondisi drainase saat ini beragam antar kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini terkait dengan topografi setempat
 - Drainase perkotaan mempunyai fungsi sebagai sebagai pengatur limpahan air (banjir) .
 - b. Persampahan
 - Secara umum pengelolaan sampah dilakukan adalah dengan mengumpulkan sampah rumah kemudian petugas mengumpulkannya dalam *Tempat Penampungan Sementara* (TPS) yang ditempatkan di setiap kelurahan atau RW. Selanjutnya truk sampah mengangkutnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
 - Saat ini sebagian Tempat Pembuangan Akhir masih *open dumping*.
 - c. Air Limbah
 - Sistem pengelolaan limbah rumah tangga di Sumatera Barat masih sederhana dengan mengalirkan saluran air limbah rumah tangga ke saluran drainase.
 - Penampungan tinja dilakukan dengan membangun tangki septik pada masing-masing rumah tangga.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan visi dan misi pembangunan nasional Tahun 2015-2019, yaitu *Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong*, maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 adalah Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas. Dalam hal ini, dukungan infrastuktur ke-PU-an dalam Dimensi Pembangunan dapat dilihat melalui gambar berikut ini.



Target Outcome Infrastruktur dalam RPJM 2015 – 2019 terkait Bidang ke-PU-an

INDIKATOR	Kondisi 2014	Target Akhir 2019
INFRASTRUKTUR DASAR		
Akses Air Minum Layak	68,5 %	100 %
Akses Sanitasi Layak	60,5 %	100 %
Kawasan Kumuh Perkotaan	37.407 Ha	0 Ha
Backlog Kebutuhan Rumah	13,5 Juta	6,8 Juta
KONEKTIVITAS		
Kemantapan Jalan Nasional	94 %	98 %
Waktu Tempuh Rata-rata	2.6 Jam/100 Km	2,2 Jam / 100 Km

Arah kebijakan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 secara umum adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang didukung dengan industri dasar melalui keterpaduan pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel. (Renstra Kemenpu-Pera Tahun 2015-2019).

Arah kebijakan tersebut lebih jauh meliputi:

1. Untuk meningkatkan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, akan dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air,
2. Untuk dukungan terhadap **konektivitas nasional** guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim, akan dilakukan melalui penurunan waktu tempuh pada koridor utama, peningkatan pelayanan jalan nasional, dan peningkatan fasilitas terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan; dan
3. Untuk dukungan terhadap peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan akan dilakukan melalui peningkatan pemenuhan **kebutuhan air minum** bagi masyarakat, peningkatan pemenuhan **kebutuhan hunian dan permukiman yang layak**, peningkatan pemenuhan **akses sanitasi bagi masyarakat**, **penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog)** baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Adapun fokus prioritas sebagai sasaran pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat untuk menunjang kegiatan program Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat dan Program Dinas Prasarana Jalan, Tata ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi dan Strategis Propinsi
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan
3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungan
4. Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
5. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase
6. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
7. Program Perencanaan Penataan Ruang
8. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara selama RPJMD baru belum terbentuk. Oleh karena itu, penetapan tujuan dan sasaran Renja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 memedomani Rencana Strategis Tahun 2010-2015 yaitu :

1. Terpenuhinya infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.
2. Terwujudnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan sasaran pembangunan infrastruktur propinsi yaitu :

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan
2. Meningkatnya pengendalian dan pemanfaatan ruang
3. Tersedianya perumahan dan permukiman masyarakat
4. Meningkatnya sarana prasarana penanggulangan bencana,

3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yaitu :

- Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
- Pencapaian MDGs.
- Pengentasan kemiskinan.
- Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
- Pengembangan daerah terisolir.

Rencana program dan kegiatan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel.T T.VI.C.10 (terlampir).

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Setelah Renja Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat untuk tahun 2017 dibuat, maka perlu dipersiapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2017 yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat.

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKPD : DINAS PRASARANA JALAN, TATA RUANG DAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				KET.
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	
TOTAL					2.857.255.355.441,00		
01 03 01	URUSAN PEKERJAAN UMUM				2.768.425.355.441,00		
01 03 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran			5.933.000.000,00		
01 03 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedia bahan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran administrasi surat menyurat pada 1 Dinas selama 1 tahun	Padang	100%	10.000.000,00	APBD	
01 03 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya dana untuk layanan jasa komunikasi (Telpon), Air & Listrik pada 1 Dinas selama 1 tahun	Padang	100%	2.000.000.000,00	APBD	
01 03 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedia bahan dan perlengkapan untuk kebersihan kantor pada 1 dinas selama 1 tahun	Padang	100%	650.000.000,00	APBD	
01 03 01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia ATK pada 1 Dinas selama 1 tahun	Padang	100%	300.000.000,00	APBD	
01 03 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan pada 1 dinas selama 1 tahun	Padang	100%	250.000.000,00	APBD	
01 03 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan Bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan selama 1 tahun	Padang	100%	40.000.000,00	APBD	
01 03 01 01 13	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlatan, perlengkapan dan interior kantor	Padang	100%	1.043.000.000,00	APBD	
	- Interior dan perlengkapan kantor		Padang	100%	1.000.000.000,00		
	- Pengadaan Mesin Absen		Padang	100%	18.000.000,00		
	- Pengadaan Papan Nama Ruangan Beserta Braket Bahan Acrylic		Padang	100%	25.000.000,00		
01 03 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan & peraturan Perundang-Undangan	Tersedia beberapa jenis media cetak lokal serta peraturan perUU yang terbaru selama 1 tahun untuk 1 Dinas	Padang	100%	30.000.000,00	APBD	
01 03 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Ke dalam Daerah dan Luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah	Sumbang dan Luar Sumbang	100%	500.000.000,00	APBD	
01 03 01 01 20	Koordinasi, Fasilitasi, dan Sinkronisasi Program Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Sinkronisasi Program Reformasi Birokrasi	Padang	100%	60.000.000,00	APBD	
01 03 01 01 22	Penyediaan Jasa Sopir	Tersedianya Jasa Tenaga Sopir	Padang	100%	350.000.000,00	APBD	
01 03 01 01 24	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Jasa Pengamanan Kantor	Padang	100%	500.000.000,00	APBD	
01 03 01 01 25	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi	Terlaksananya Kegiatan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Padang	100%	200.000.000,00	APBD	
01 03 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kelancaran Tugas Aparatur			3.889.500.000,00		
01 03 01 02 15	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya Komputer, Notebook dan Printer	Padang	100%	195.000.000,00	APBD	
	- Pengadaan Komputer PC		Padang	100%	90.000.000,00		
	- Pengadaan Notebook		Padang	100%	55.000.000,00		
	- Pengadaan Printer Scanner		Padang	100%	50.000.000,00		
01 03 01 02 16	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Terpenuhinya Penyediaan Alat Studio, Komunikasi dan Informasi	Padang	100%	129.500.000,00	APBD	
	- Pengadaan Proyektor		Padang	100%	60.000.000,00		
	- Pengadaan Layar Proyektor		Padang	100%	45.000.000,00		
	- Pengadaan LED TV 32 Inch		Padang	100%	4.500.000,00		
	- Pengadaan LED TV 40 Inch		Padang	100%	20.000.000,00		
	- Pengadaan Sound System		Padang	100%			
01 03 01 02 23	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	Padang	100%	500.000.000,00	APBD	
01 03 01 02 25	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	100%	350.000.000,00	APBD	
01 03 01 02 27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Komputer dan Jaringan	Padang	100%	15.000.000,00	APBD	
01 03 01 02 29	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terlaksananya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Padang	100%	200.000.000,00	APBD	
01 03 01 02 32	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Padang	100%	2.500.000.000,00	APBD	
01 03 01 02 32	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	100%	500.000.000,00	APBD	
01 03 01 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tercapainya Peningkatan Disiplin Aparatur			350.000.000,00		
01 03 01 03 01	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedia pakaian dinas	Padang	100%	350.000.000,00	APBD	

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				KET.
						LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
01	03	01	05	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur	Terciptanya Peningkatan SDM Aparatur		100	350.000.000,00		
01	03	01	05	02 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan per UU dengan bertambahnya kapasitas SDM	Padang	100%	350.000.000,00	APBD	
01	03	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Tertib Administrasi Keuangan			1.750.000.000,00		
01	03	01	06	01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja SKPD (LAKIP, LKPI dan LPPD) dengan baik	Sum Bar	100%	100.000.000,00	APBD	
01	03	01	06	03 Penyusunan Program, Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya Program, Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Sum Bar	100%	350.000.000,00	APBD	
01	03	01	06	04 Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	Terlaksananya Monev Kinerja dan Pelaporan Program Tahunan	Sum Bar	100%	300.000.000,00	APBD	
01	03	01	06	05 Penatausahaan keuangan SKPD	Terlaksananya administrasi keuangan secara baik dan benar	Padan g	100%	1.000.000.000,00	APBD	
01	03	01	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi				1.901.578.855.441,00		
1	03	01	15	01 Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jalan dan Jembatan Propinsi	Sumatera Barat	100%	9.000.000.000,00	APBD	
				- Paket Penyusunan Data Base Jalan Provinsi			1 Dokumen	650.000.000,00		
				- Paket Update Data Base Jalan			1 Dokumen	550.000.000,00		
				- Paket Penyusunan Data Base Jembatan Provinsi			1 Dokumen	300.000.000,00		
				- Paket Update Data Base Jembatan			1 Dokumen	400.000.000,00		
				- Paket Penyusunan DED Jalan Provinsi			3 Dokumen	1.200.000.000,00		
				- Paket Penyusunan DED Jembatan Provinsi			4 Dokumen	1.300.000.000,00		
				- Paket Survey Pekerjaan Mendesak dan Bencana Alam			2 Dokumen	500.000.000,00		
				- Survey IRMS			1 Dokumen	600.000.000,00		
				- Survey BMS			1 Dokumen	500.000.000,00		
				- Studi Laik Fungsi Jalan			2 Dokumen	1.400.000.000,00		
				- Perencanaan Jembatan di Ruas Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh			4 Paket	1.600.000.000,00		Solok Selatan
01	03	01	15	03 Pengawasan Pembangunan Jalan & Jembatan Provinsi	Terkendalinya Pembangunan Jalan dan Jembatan	Sumatera Barat	100%	27.000.000.000,00		
01	03	01	15	04 Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, Studi Kelayakan dan LARAP Pembangunan Jalan dan Jembatan Propinsi dan TPA Sampah dan Monitoring Amdal	Sumatera Barat		2.700.000.000,00		
01	03	01	15	07 Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi di Wilayah Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kota Padang dan Kab. Pesisir Selatan	Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan	4,4 Km	193.250.000.000,00	APBD	
				- Paket Pembangunan Jalan Teluk Bayur-Nipah-Purus (P.098)			1 Km	10.000.000.000,00		
				- Paket Pembangunan Jalan Purus-Bandara International Minangkabau (P.099)			1 Km	10.000.000.000,00		
				- Paket Pembangunan Jalan Penghubung Jembatan Kuranji - Durian Tarung			1,2 Km	12.000.000.000,00		
				- Paket Pembangunan Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket I			1,2 Km	11.250.000.000,00		
				- Pembukaan Jalan Surantih - Langgai		Kecamatan Sutera		150.000.000.000,00		
01	03	01	15	08 Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman	Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman	7 Km	45.000.000.000,00	APBD	
				- Paket Pembangunan Jalan Duku-Sicincin (P.087)			3 km	15.000.000.000,00		
				- Paket Peningkatan Jalan Simp. Duku (Ketaping) - Pariaman (P.075)			3 km	15.000.000.000,00		
				- Paket Peningkatan Jalan Simpang Koto Mambang-Balingka (P.078)			1 km	7.500.000.000,00		
				- Pelebaran Jalan Sicincin - Kurai Taji			2,65 Km	7.500.000.000,00		
01	03	01	15	09 Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Solok dan Kota Solok	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan di Wilayah Kab. Solok dan Kota Solok	Kabupaten Solok dan Kota Solok	8 Km	53.750.000.000,00	APBD	
				- Paket Pembangunan Jalan Pasar Baru - Alahan Panjang (P.073) Paket II			3,5 km	26.250.000.000,00		
				- Paket Peningkatan Jalan Sp. Ganting Payo- Batas Tanah Datar-Sumani (P.092)			1 km	7.500.000.000,00		
				- Paket Peningkatan Jalan Solok - Alahan Panjang (P.071)			1 km	7.500.000.000,00		
				- Paket Peningkatan Jalan Singkarak-Aripan-Tj Balit-Padang Ganting (P.093)			1,5 km	7.500.000.000,00		
				- Paket Peningkatan Jalan Pintu Angin - Labuah Saiyo (P.094)			1 km	5.000.000.000,00		
				- Paket Peningkatan Jalan Rawang - Talawi			2 Km	10.000.000.000,00		Kab. Solok
				- Paket Peningkatan Jalan Alahan Panjang - Kiliran Jao			2 Km	10.000.000.000,00		Kab. Solok

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				KET.
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
01 03 01 15 10	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	Terlaksananya Pembangunan Jalan di Wilayah Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh	6 Km	34.000.000.000,00	APBD	
	- Paket Peningkatan Jalan Lingkar Selatan (Payakumbuh) (P.084)			1 km	6.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Pangkalan Koto Baru-Sialang-Gelugur (P.076)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Simpang Padang Karamah-Tj. Bungo (P.083)			1 km	8.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Bts. Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi (P.069.2)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Bts. Kota Payakumbuh-Sitangkai (P.044)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Palupuh-Puah gadih-Koto Tinggi (P.090) Paket I			1 km	5.000.000.000,00		
01 03 01 15 11	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat	Terlaksananya Pembangunan Jalan di Wilayah Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat	Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat	6,5 Km	35.000.000.000,00	APBD	
	- Paket Peningkatan Jalan Panti-Simpang Empat (P.031)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Padang Sawah-Kumpulan (P.068)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Tapus-Muaro Sei. Lolo-Gelugur (P.101)			2,5 km	12.500.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Lubuk Sikaping-Talu (P.096)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Paket Peningkatan Jalan Bungo Tanjung-Teluk Tapang (P.097)			1 km	7.500.000.000,00		
01 03 01 15 12	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya	Terlaksananya Pembangunan Jalan di Wilayah Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya	Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Dharmasraya	6 Km	435.500.000.000,00	APBD	
	- Paket Peningkatan Jalan Simancung-Tanjung Ampalu (P.007)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Tj. Ampalu - Sijunjung (P.008)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Koto Baru - Tanjung Simalidu (P.011)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Simp. Sikabau-Simp. Koto Baru (P.010)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Simpang Koto Baru-Junction (P.012)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh (P.056.3) Paket I			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Alahan Panjang - Kiliran Jao			38 km	152.000.000.000,00		Kab. Sijunjung
	- Paket Sitangkai - Tj. Ampalu			15 Km	60.000.000.000,00		Kab. Sijunjung
	- Paket Sijunjung - Tanah Bedantung			2,7 Km	13.500.000.000,00		Kab. Sijunjung
	- Peningkatan dan Pelebaran Jalan Simpang 3 Koto Baru-Junction			5,55 km	30.000.000.000,00		Dharmasraya
	- Peningkatan dan Pelebaran Jalan Junction - Abai Siat			28,33 km	150.000.000.000,00		Dharmasraya
01 03 01 15 13	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kota Sawahlunto dan Kab. Tanah Datar	Terlaksananya Pembangunan Jalan di Wilayah Kota Sawahlunto dan Kab. Tanah Datar	Kota Sawahlunto dan Kabupaten Tanah Datar	8 Km	84.000.000.000,00	APBD	
	- Paket Peningkatan Jalan Kubu Kerambil-Bts. Batusangkar (Simp. Kiambang) (P.035)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Baso-Bts. Batusangkar (Balai Selasa) (P.036)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Batusangkar (Bukit Gombak)-Guguk Cino-Sitangkai (P.037)			2 km	10.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Guguk Cino-Sawahlunto (Lapangan Segitiga) (P.038)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Sitangkai-Tj. Ampalu (P.040)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Peningkatan Jalan Simpang Napar-Bukit Bual-Tanjung Ampalu (P.091)			1 km	5.000.000.000,00		
	- Paket Peningkatan Jalan Rawang-Talawi (P.102) Paket II			1 km	5.000.000.000,00		
	- Peningkatan jalan Simp Baso - Piladang (P.079)			11,14 KM	14.000.000.000,00		Tanah Datar
	- Peningkatan jalan Simp Gantiang Payo - Batas Tanah Datar - Sumani (P.092)			6 Km	30.000.000.000,00		Tanah Datar
	- Peningkatan Jalan Talawoi - Rawang Pasilihan				15.000.000.000,00		Sawahlunto
01 03 01 15 17	Peningkatan Jalan Provinsi DAK	Terlaksananya Peningkatan Jalan Provinsi (DAK)	Kabupaten Solok Selatan	100%	2.000.000.000,00	APBD	
01 03 01 15 20	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Agam dan Kota Bukittinggi	Terlaksananya Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Agam dan Kota Bukittinggi	Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi	6,5 Km	72.700.000.000,00	APBD	
	- Paket Peningkatan Jalan Simpang Baso-Piladang (P.079)			1 km	5.000.000.000,00		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				KET.				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA					
	- Paket Peningkatan Jalan Matur-Palembayan (P.080)			1 km	5.000.000.000,00						
	- Paket Peningkatan Jalan Manggopoh - Padang Luar (P.025)			1 km	5.000.000.000,00						
	- Paket Peningkatan Jalan Palembang-Palupuh (Simp. Patai), Jalan Koto Gadang			1 km	5.000.000.000,00						
	- Paket Peningkatan Jalan Palupuh-Pua Gadih-Koto Tinggi (P.090)			1,5 km	6.500.000.000,00						
	- Paket Peningkatan Jalan Lubuk Basung-Sungai Limau (P.072)			1 km	5.000.000.000,00						
	- Peningkatan Jalan Padang Koto Gadang - Palembang				16.200.000.000,00						
	- Peningkatan Jalan Palupuh - Pagadih - Koto Tinggi				25.000.000.000,00						
01	03	01	15	22	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Solok Selatan	Terlaksananya Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan	5,5 Km	461.000.000.000,00	APBD	
					- Paket Peningkatan Jalan Junction-Abai Siat (P.054)			1 km	5.000.000.000,00		
					- Paket Peningkatan Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh (P.056.3) Paket II			2 km	10.000.000.000,00		
					- Paket Peningkatan Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1)			1 km	5.000.000.000,00		
					- Paket Peningkatan Jalan Lubuk Malako-Abai Sangir (P.056.2)			1,5 km	7.500.000.000,00		
					- Paket Peningkatan Jalan Simp. Padang Aro - Lubuk Malako (P.056.1))			20,07 km	30.000.000.000,00		DED Telah Tersedia
					- Paket Peningkatan Jalan Abai Sangir - Sungai Dareh (P.056.3)			60 Km	180.000.000.000,00		DED Telah Tersedia
					- Peningkatan Jalan Teluk Air Putih - Abai Siat			74, 50 Km	223.500.000.000,00		DED Telah Tersedia
01	03	01	15	23	Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Kepulauan Mentawai	Terlaksananya Pembangunan Jalan Provinsi di Wilayah Kab. Kepulauan Mentawai	Kepulauan Mentawai	4,5 Km	45.000.000.000,00	APBD	
					- Paket Pembangunan Jalan Simp. SP II-Kantor Camat (P.103)			2 Km	20.000.000.000,00		
					- Paket Pembangunan Jalan Kantor Camat-Berkat (P.104)			2,5 Km	25.000.000.000,00		
01	03	01	15	14	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah - I	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah - I	Sumatera Barat	275 M	165.370.626.835,00	APBD	
					- Pembangunan Jembatan Aia Janiah (P.073)			25 m	16.270.626.835,00		
					- Pembangunan Jembatan Lolong (P.099)			250 m	15.000.000.000,00		
					- Pembangunan Jembatan Sei. Kayu Gadang I (P.086).		Padang Pariaman	100 m	25.000.000.000,00		
					- Pembangunan Jembatan di Ruas Jalan Simp. SP II-Kantor Camat (P.103)				5.100.000.000,00		
					- Pembangunan Jembatan Baringin II & III		Lb. Kilangan	60 m & 60m	30.000.000.000,00		Kota Padang
					- Pembangunan Jembatan Lubuk Sarik		Lb. Begalung	35 m	8.000.000.000,00		Kota Padang
					- Pembangunan Jembatan Sungai Jirak		Lb. Begalung	30 m	13.000.000.000,00		Kota Padang
					- Pembangunan Jembatan Kampung Baru		Lb. Begalung	30 m	8.000.000.000,00		Kota Padang
					- Lanjutan Pembangunan Jembatan Lenggogeni			60 m	20.000.000.000,00		Padang Pariaman
					- Lanjutan Pembangunan Jembatan Anduriang			100 m	25.000.000.000,00		Padang Pariaman
01	03	01	15	15	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah - II	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah - II	Sumatera Barat	215,94 M	70.853.393.299,00	APBD	
					- Pembangunan Jembatan Beringin, Jembatan Sungai Taleh, Jembatan Sei. Puar 1, Jembatan Sei. Puar dan Jembatan Batang Kaciak (P.080)			45 m	11.454.856.163,00		
					- Pembangunan Jembatan Lubuk Gadang (P.088)			10 m	3.000.000.000,00		
					- Pembangunan Jembatan Kalulutan dan Jembatan Tiku (P.072)			35 M	10.500.000.000,00		
					- Pembangunan Jembatan Barulak dan Jembatan Batang Ketek (P.079)			43,94 m	12.739.659.281,00		
					- Pembangunan Jembatan Titian Sambung dan Jembatan Lubuk Pandan (P.069.2)			32 m	12.578.877.855,00		
					- Pembangunan Jembatan Batang Bui, Jembatan Batang Pisang Hutun (P.033)			35 m	10.500.000.000,00		
					- Jembatan Batang Aka (P.088)			15 m	4.500.000.000,00		
					- Jembatan Dadok, Jembatan Gantiang, Jembatan Tangah(P.090)			-			
					- Pembangunan Jembatan Hulu Sumpur (Ruas Jalan Lubuk Sikaping - Talu)			1 unit	2.000.000.000,00		Pasaman
					- Pembangunan Jembatan Tambuluh Gadang (Ruas Jalan Padang Sawah - Kumpulan)			1 unit	1.000.000.000,00		Pasaman
					- Pembangunan Jembatan Durian				1.800.000.000,00		Agam
					- Pelebaran Jembatan di Kelok 44				240.000.000,00		Agam
					- Pelebaran Jembatan Kp. Tangah Lubuk Basung				540.000.000,00		Agam
01	03	01	15	16	Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah - III	Terlaksananya Pembangunan Jembatan Provinsi Wilayah - III	Sumatera Barat	163,1 M	114.754.835.307,00	APBD	
					- Pembangunan Jembatan Galonggang dan Jembatan Batang Palo (P.056.3)		Solok Selatan	39 m	10.824.835.307,00		
					- Pembangunan Jembatan Viaduct (P.007)			16 m	5.000.000.000,00		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				KET.
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	- Pembangunan Jembatan Dusun Tinggi (P. 082)						
	- Pembangunan Jembatan Batang Basi, Jembatan Kayu Aro, Jembatan Rimbo Data (P.071)			65 m	19.500.000.000,00		
	- Pembangunan Jembatan Batang Sitapus dan Batang Jujuan (P.056.3)		Solok Selatan	43,1 m	12.930.000.000,00		
	- Jembatan Tareh (P.007)			12 M	1.800.000.000,00		Sijunjung
	- Jembatan Batang Malato (P. 007)			9 M	1.350.000.000,00		Sijunjung
	- Jembatan Batang Kumanis			8 m	1.200.000.000,00		Sijunjung
	- Jembatan Batang Rambutan (Ruas Tj. Ampalu Sijunjung)			25 m	3.750.000.000,00		Sijunjung
	- Jembatan Batang Basung (Ruas Tj. Ampalu - Sijunjung)			6 m	900.000.000,00		Sijunjung
	- Jembatan Batang Bae (Ruas Tj. Ampalu - Sijunjung)			25 m	3.750.000.000,00		Sijunjung
	- Jembatan Batang Kaloko (Ruas Tj. Ampalu - Sijunjung)			25 m	3.750.000.000,00		Sijunjung
	- Pembangunan Jembatan Pulau			180 m	40.000.000.000,00		Dharmasraya
	- Pembangunan Jembatan Kanang P.092				2.000.000.000,00		Tanah Datar
	- Pembangunan Jembatan Muara Ambius (P.092)				3.000.000.000,00		Tanah Datar
	- Pembangunan Jembatan Barulak (P.079) (KM.9)				3.000.000.000,00		Tanah Datar
	- Penggantian Jembatan Sikalang (Ruas Jalan Propinsi Guguk Cino - Sawahlunto - Lap. Segitiga)			2 unit	2.000.000.000,00		Sawahlunto
	- Pembangunan Jembatan Rangka Baja Simpang Napas (Ruas Jalan Propinsi Guguk Cino - Sawahlunto - Lap. Segitiga)				2.000.000.000,00		Sawahlunto
01 03 01 15 05	Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jalan /Jembatan di Sumatera Barat	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Program Pembangunan Jalan / Jembatan Provinsi	Sumatera Barat	100%	700.000.000,00		
01 03 01 15 18	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Jalan/Jembatan Provinsi	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Jalan dan Jembatan Provinsi	Sumatera Barat	100%	20.000.000.000,00	APBD	
01 03 01 15 06	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis	Tersedianya Lahan Untuk Pembangunan Infrastruktur Strategis	Sumatera Barat	100%	30.000.000.000,00	APBD	
01 03 01 18	Program Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi				284.954.000.000,00		
01 03 01 18 01	Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Pasaman dan Pasaman Barat	Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat	Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat	143,33 Km	23.856.000.000,00	APBD	
	- Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Rao - Rokan Hulu			1 paket	5.000.000.000,00		Pasaman
	- Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Lubuk Sikaping - Talu	152.254.000.000			3.000.000.000,00		Pasaman
	- Pembangunan Drainase/Trotoar Jalan Provinsi di dalam kota (Ruas Simp. Empat-Panti, Simp. Empat - Sasak, Air Balam - Air Bangis)				12.000.000.000,00		
01 03 01 18 02	Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Bukittinggi dan Kab. Agam Timur	Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Bukittinggi dan Kab. Agam Timur	Kab. Agam dan Bukittinggi	127,11 Km	3.266.000.000,00	APBD	
01 03 01 18	Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Agam	Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Agam	Kab. Agam	129,50 Km	3.310.000.000,00	APBD	
01 03 01 18 03	Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	122,02 Km	42.339.000.000,00	APBD	
	- Peningkatan Jalan Lingkar Selatan (Jalan Singa Harau, Jalan Agus Salim, Jalan Panglima Polim, Jalan Mahoni)		Kota Payakumbuh		25.000.000.000,00		
	- Pembangunan Drainase Padang Lua - Jambu Air				2.500.000.000,00		Agam
	- Pembangunan Drainase dan Trotoar Padang Lua - Maninjau				2.500.000.000,00		Agam
	- Pembangunan Drainase Sungai Buluh				1.200.000.000,00		Agam
	- Pembangunan Drainase Lubuk Basung				5.000.000.000,00		Agam
	- Pembangunan Drainase Baruan Kasiak Simpang Gadang				1.000.000.000,00		
01 03 01 18 04	Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang	Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Tnh Datar dan Kota Pdg Panjang dan Terbangunnya Drainase di Simabur	Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang	123,60 Km	27.889.000.000,00	APBD	
	- Rehab Jalan Batusangkar - Ombilin (P.070)				4.500.000.000,00		Tanah Datar
	- Pembangunan Drainase Ruas Jalan Balai Tengah Tapi Selo (P.044)				3.500.000.000,00		Tanah Datar
	- Pembangunan Drainase Ruas Jalan Kubu Kerambil - Bts. Sangka (P.035)				3.500.000.000,00		Tanah Datar
	- Pembangunan Drainase Ruas Jalan Tanjung Emas (P.037)				2.000.000.000,00		Tanah Datar
	- Pembangunan Drainase Ruas Sungai Tarap (P.036)				2.000.000.000,00		Tanah Datar

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				KET.
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
	- Pembangunan Drainase Ruas Tabek Patah (P.036)				4.000.000.000,00		Tanah Datar
	- Pembangunan Drainase Ruas Tanjung Alam (P.079)				4.000.000.000,00		Tanah Datar
01 03 01 18 05	Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang	Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Pdg Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang	Kab. Pdg Pariaman, Kota Pariaman dan Kota Padang	100,00 Km	59.727.000.000,00	APBD	
	- Pemeliharaan Jalan Lubuak Basung - Sungai Limau			28,5 km	57.000.000.000,00		Kab. Padang Pariaman
01 03 01 18 06	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kab. Solok dan Kota Solok	Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Solok dan Kota Solok	Kab. Solok dan Kota Solok	121,21 Km	3.112.000.000,00	APBD	
01 03 01 18 07	Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kab. Solok Selatan	Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Solok Selatan	Kab. Solok Selatan	116,38 Km	2.996.000.000,00	APBD	
01 03 01 18 08	Rehab/Pemel Rutin Jalan Propinsi di Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya	Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kota Swahlunto, Kab. Sijg dan Kab. Dharmasraya	Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya	130,20 Km	3.575.000.000,00	APBD	
01 03 01 18 09	Rehab/Pemel Rutin Jalan Provinsi di Kab. Pesisir Selatan	Terlaksananya Rehab/Pemel Rutin Jln Prop di Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	100,00 Km	2.205.000.000,00	APBD	
01 03 01 18 14	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan Propinsi dan Bangunan Pelengkap Jalan	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jembatan Propinsi	Sumatera Barat	100,00 M ²	4.259.000.000,00	APBD	
01 03 01 18 13	Pengendalian Pelaksanaan Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan Propinsi	9 Wilayah Kab/Kota	9 Wil	247.000.000,00	APBD	
01 03 01 18 10	Pemeliharaan Peralatan Jalan dan Jembatan	Terkontrol dan Terpeliharanya Peralatan Jalan dan Jembatan	Padang	27 Unit	5.500.000.000,00	APBD	
	- Paket Pembuatan Hanggar Perlatan dan Kantor			1 Unit	5.000.000.000,00		
01 03 01 18 16	Penanganan Kondisi Kritis Jalan dan Jembatan Provinsi	Terlaksananya Penanganan Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Kritis akibat Bencana Alam	Provinsi Sumatera Barat	9 Wil	3.153.000.000,00	APBD	
01 03 01 18 21	Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Bidang Peralatan dan Bahan Jalan Provinsi Sumbang	Pembinaan dan Koordinasi Kegiatan Bidang Peralatan dan Bahan Jalan Provinsi Sumbang	Provinsi Sumatera Barat	60 Orang	500.000.000,00	APBD	
01 03 01 18	Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Bahan Jalan dan Jembatan	Sumatera Barat	8 Unit Pick Up, 1 Mini Bus, 2 Unit Honda Trabas	2.020.000.000,00		
01 03 01 18 24	Survey Leger Jalan dan Jembatan Propinsi dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Terlaksananya Survey Leger Jalan dan Jembatan Propinsi di Wilayah I, II dan III dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana	Sumatera Barat	300,00 Km	2.500.000.000,00	APBD	
	- Paket Survey Jalan dan Jembatan Provinsi						
	- Paket Survey Pemetaan Daerah Rawan Bencana						
	- Paket Survey Pemetaan Daerah Rawan Kecelakaan						
01 03 01 18	Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah I	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah I	Sumatera Barat	20,00 Km	31.500.000.000,00	APBD	
01 03 01 18	Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah II	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah II	Sumatera Barat	20,00 Km	31.500.000.000,00	APBD	
01 03 01 18	Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah III	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan Wilayah III	Sumatera Barat	20,00 Km	31.500.000.000,00	APBD	
01 03 01 23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ke Binamargaan	Peningkatan kualitas sarana jalan dan jembatan dalam rangka mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat			3.260.000.000,00		
01 03 01 23 01	Kegiatan Pemeliharaan Alat - alat Ukur Laboratorium Ke Binamarga an	Meningkatnya kinerja laboratorium UPTD	Padang	100%	330.000.000,00	APBD	
01 03 01 23 02	Kegiatan Pengadaan Alat - alat Ukur dan Laboratorium Ke Binamarga an.	Meningkatnya kinerja laboratorium UPTD	Padang	100%	2.700.000.000,00	APBD	
	- Paket Pengadaan Alat Lab. Tanah dan Aspal		Padang	100%	-		
	- Paket Pengadaan Alat Lab. Lingkungan		Padang	100%	-		
	- Paket Pengadaan Alat Lab. Beton		Padang	100%	-		
	- Paket Pengadaan Bahan Kimia		Padang	100%	-		
01 03 01 23 03	Monitoring Pengendalian Mutu UPTD	Terkendalnya mutu bahan untuk pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan	Sumatera Barat	100%	230.000.000,00	APBD	
01 03 01 28	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya cakupan dan kualitas Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah			227.880.000.000,00		
01 03 01 28 01	Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat	Telaksananya Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Keciptakaryaan di Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	12 bulan	350.000.000,00	APBD	
01 03 01 28 02	Pembinaan Kegiatan PAMSIMAS di Provinsi Sumatera Barat	Terdukungnya program nasional Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	12 bulan	180.000.000,00	APBD	

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				KET.
							LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
01	03	01	28	03	Workshop dan Pelatihan Air Minum Provinsi Sumatera Barat	Meningkatkan SDM pengelolaan Sistem Pelayanan Air Minum dan Air Limbah di Provinsi Sumatera Barat untuk Pemerintah Daerah, Pengelola PAMSIMAS, Badan Pengelola SPAM dan PDAM	Sumatera Barat	4 Workshop	500.000.000,00	APBD	
01	03	01	28	04	Penyusunan DED dan Amdal SPAM Regional Prov. Sumatera Barat	Tersusunnya DED dan Amdal SPAM Regional Prov. Sumatera Barat		7 Dokumen	5.550.000.000,00	APBD	
					- DED SPAM Regional Kab. Agam dan Kota Bukittinggi		Kab. Agam dan Kab. Solok dan Kota Solok	100%	750.000.000,00		
					- DED SPAM Regional Kab. Solok dan Kota Solok		Kab. Solok dan Kota Pariaman dan Kab. Pdg Pariman	100%	750.000.000,00		
					- DED SPAM Regional Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman		Kab. Agam dan Kab. Solok dan Kota Pariaman dan Kab. Pdg Pariman	100%	750.000.000,00		
					- Penyusunan Amdal SPAM Regional Kab. Agam dan Kota Bukittinggi		Kab. Solok dan Kota Pariaman dan Kab. Pdg Pariman	100%	700.000.000,00		
					- Penyusunan Amdal SPAM Regional Kab. Solok dan Kota Solok		Kab. Solok dan Kota Pariaman dan Kab. Pdg Pariman	100%	700.000.000,00		
					- Penyusunan Amdal SPAM Regional Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman		Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	100%	700.000.000,00		
					- Penyusunan AMDAL SPAM Regional Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh		Kota Pariaman dan Kab. Pdg Pariman	100%	700.000.000,00		
					- Penyusunan FS SPAM Regional Kota Pariaman dan Kab. Padang Pariaman		Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh	100%	500.000.000,00		
01	03	01	28	05	Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Prov. Sumatera Barat Wilayah I	Terlaksananya Pembangunan P/S Air Minum kawasan di Provinsi Sumatera Barat di Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman Barat, Kab. Tanah Datar, Kab. Pesisir Selatan	Sumatera Barat	6 Kws	202.900.000.000,00	APBD	
					- Peningkatan SPAM Kws. Ujung Gading Kab. Pasaman Barat (lanjutan)		Kab. Pas Bar	100%	5.000.000.000,00		
					- Pembangunan SPAM Regional Durian Gadang Kab. 50 Kota		Kab. 50 Kota	100%	7.000.000.000,00		
					- Pengawasan Peningkatan SPAM Kws. Ujung Gading Kab. Pasaman Barat (lanjutan)		Kab. Pas Bar	100%	150.000.000,00		
					- Pengawasan Pembangunan SPAM Regional Durian Gadang Kab. 50 Kota		Kab. 50 Kota	100%	50.000.000,00		
					- Lanjutan Peningkatan SPAM Kws. Salimpauang Kab. Tanah Datar		Kab. Tanah Datar	100%	5.000.000.000,00		
					- Lanjutan Peningkatan SPAM Kws. Maninjau Kab. Agam		Kab. Agam	100%	5.000.000.000,00		
					- Pembangunan SPAM Regional Kota Payakumbuh dan Kab. 50 Kota				10.000.000.000,00		
					- Pembangunan SPAM Regional Batang Tabik Kab. 50 Kota dan Kota Payakumbuh				10.000.000.000,00		
					- Pembangunan SPAM Regional Maek Kab. 50 Kota				7.000.000.000,00		
					- Pembangunan SPAM Regional Durian Gadang Kab. 50 Kota				7.000.000.000,00		
					- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Situak Lotok				3.000.000.000,00		Pas - Bar
					- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kec. Pasaman				4.000.000.000,00		Pas - Bar
					- Pengadaan Sumber Air Bersih/PDAM Kec. Silaut				10.000.000.000,00		Pesel
					- Rehabilitasi Sarana Air Bersih Nagari Sambungo				3.000.000.000,00		Pesel
					- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum Situak Lotok		Kec. Lembah Melintang		3.000.000.000,00		Pasbar
					- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum		Kec. Pasaman		4.000.000.000,00		
					- Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum		Kec. Gunung Tuleh		2.000.000.000,00		
					- Pengembangan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			6 KWS	25.500.000.000,00		Pasaman
						IKK Kapalo Banda, Nag. Air Manggis Lb. Sikaping			4.500.000.000,00		
						IKK Marumuak Nag. Tanjung Baringin			4.000.000.000,00		
						IKK Malampah			3.500.000.000,00		
						IKK Nag. Tarung Tarung			2.500.000.000,00		
						IKK Nagari Simpang			3.000.000.000,00		
						IKK Nag. Ladang Panjang			8.000.000.000,00		
					- Pembangunan Intake dan Jaringan Transmisi Guguk Lasung		Kota Solok dan Kab. Solok	1 paket	54.000.000.000,00		Kota Solok
					- Peningkatan Palayanan Air Minum PPL Pakan Kamih				1.200.000.000,00		Agam
					- Penambahan Kapasitas Sumber Air Baku dari Batang Sianok				12.000.000.000,00		Bukittinggi
					- Penambahan Kapasitas Sumber Baku dari Sungai Balingka				25.000.000.000,00		Bukittinggi

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				KET.
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
01 03 01 28 06	Peningkatan Kinerja Pelayanan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Prov. Sumatera Barat Wilayah II	Terlaksananya Pembangunan P/S Air Minum kawasan di Kota Padang, Kab. Solok, Kab. Dharmasraya, Kab. Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kab. Bukittinggi	Sumatera Barat	1 Kws	18.000.000.000,00	APBD	
	- Paket Peningkatan SPAM Kws. Kinali Kab. Pasaman Barat				3.000.000.000,00		
	- Lanjutan Peningkatan SPAM Kws. Koto Baru Kab. Dharmasraya			1 kws	5.000.000.000,00		Dharmasraya
	- Paket Peningkatan SPAM Kws. Pulau Punjung			1 kws	5.000.000.000,00		Dharmasraya
	- Paket Peningkatan SPAM Kws. Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya			1 kws	5.000.000.000,00		Dharmasraya
01 03 01 28	Updating Database Bidang Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat	Tersusunnya Database Bidang Keciptakarya di Provinsi Sumatera Barat	19 Kab/Kota		400.000.000,00		
01 03 01 34	Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penataan bangunan dan lingkungan			310.000.000.000,00		
01 03 01 34	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana I	Terlaksananya Pembangunan Pasca Bencana I			30.000.000.000,00		
	- Lanjutan Pembangunan Gedung ESDM Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat	Kota Padang	100%	10.000.000.000,00	APBD	
	- Lanjutan Pembangunan Gedung Pemberdayaan Wanita dan KB	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Pemberdayaan Wanita dan KB	Kota Padang	100%	10.000.000.000,00	APBD	
	- Pembangunan Gedung Badan Ketahanan Pangan	Terlaksananya Pembangunan Gedung Badan Ketahanan Pangan	Kota Padang	100%	10.000.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana II	Terlaksananya Pembangunan Pasca Bencana II			7.000.000.000,00		
	- Lanjutan Pembangunan Gedung UPTD Balai Diklat Koperasi	Tersedianya Bangunan Gedung UPTD Balai Diklat Koperasi	Kota Padang	100%	2.000.000.000,00	APBD	
	- Lanjutan Pembangunan Gedung Satkorlak PB	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung Satkorlak PB	Kota Padang	100%	5.000.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Rekonstruksi Bangunan Pasca Bencana III	Terlaksananya Pembangunan Pasca Bencana III			54.000.000.000,00		
	- Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan	Terlaksananya Pembangunan Gedung Dinas Pendidikan	Kota Padang	100%	10.000.000.000,00	APBD	
	- Pembangunan Gudang DIPO (Kantor Arsip)	Terlaksananya Pembangunan Gudang DIPO (Kantor Arsip)	Kota Padang	100%	5.000.000.000,00	APBD	
	- Pembangunan Gedung Dinas Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Gedung Dinas Pertanian	Kota Padang	100%	10.000.000.000,00	APBD	
	- Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas Wakil Gubernur	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Wakil Gubernur	Kota Padang	100%	11.000.000.000,00		
	- Lanjutan Pembangunan Gedung Bundo Kanduang	Terlaksananya Pembangunan Gedung Bundo Kanduang	Kota Padang	100%	8.000.000.000,00		
	- Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perkebunan	Terlaksananya Pembangunan Gedung Dinas Perkebunan	Kota Padang	100%	10.000.000.000,00		
01 03 01 34	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Wialayah I	Terbangunnya Shelter Evakuasi Tsunami Wialayah I			5.000.000.000,00		
	- Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Linggar Jati	Terbangunnya Shelter Evakuasi Tsunami di Linggar Jati	Kota Padang	100%	5.000.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami Wialayah II	Terbangunnya Shelter Evakuasi Tsunami Wialayah II			30.000.000.000,00		
	- Pembangunan Shelter Evakuasi Tsunami di Wilayah Kab. Padang Pariaman dan Kab. Pasaman	Terbangunnya Shelter Evakuasi Tsunami di Wilayah Kab. Padang Pariaman dan Kab. Pasaman	Kab. Padang Pariaman dan Kab. Pasaman	100%	10.000.000.000,00	APBD	
	- Pembangunan Shelter di Kec. Sungai Limau		Kab. Padang Pariaman		10.000.000.000,00		
	- Pembangunan Shelter di Kec. Ulahan Tapakis		Kab. Padang Pariaman		10.000.000.000,00		
01 03 01 34	Lanjutan Pembangunan Main Stadium Sumatera Barat	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Main Stadium Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	100%	60.000.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Lanjutan Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera	Tersedianya Gedung Convention Hall Sumatera	Kota Padang	100%	25.000.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Lanjutan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat	Kota Padang	100%	30.000.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas TNI AD	Terlaksananya Lanjutan Pembangunan Rumah Dinas TNI AD Kodim 03/04 Agam	Kota Bukittinggi	100%	700.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur	Terlaksananya Pembangunan Gedung Utama Kantor Gubernur	Kota Padang	100%	50.000.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Pembangunan Prasasti APDN Lama	Terlaksananya Pembangunan Prasasti APDN Lama	Kota Bukittinggi	1 Unit	500.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang di Yogyakarta	Terlaksananya Pembangunan Asrama Mahasiswa Minang di Yogyakarta	Kota Yogyakarta	1 Unit	9.750.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Pembinaan dan Monev Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Infrastruktur Berbasis Kemasyarakatan	Terlaksananya Pembinaan dan Monev Program Penataan Bangunan dan Lingkungan dan PNPB Mandiri Perkotaan	Sumatera Barat	100%	300.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara di Sumatera Barat	Tersedianya Pembinaan dan Pengelolaan Teknis (TPT) Bangunan Negara Sumatera Barat	Sumatera Barat	100%	250.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Perencanaan Bangunan Gedung	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Gedung	Sumatera Barat	100%	3.000.000.000,00	APBD	
01 03 01 34	Pengawasan Bangunan Gedung	Terawasinya Pembangunan Gedung	Sumatera Barat	100%	4.500.000.000,00	APBD	
01 03 01 40	Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi				3.050.000.000,00		
01 03 01 40	Kegiatan Lokakarya, Sosialisasi dan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi	Terlaksananya Pembinaan dan Penerapan Jasa Konstruksi	Sumatera Barat	9 x Kegiatan	400.000.000,00	APBD	
01 03 01 40	Kegiatan Bimbingan Teknis/Workshop Jasa Konstruksi	Peningkatan Pengetahuan Pelaku Jasa Konstruksi	Sumatera Barat	12 x Kegiatan	900.000.000,00	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				KET.
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
01 03 01 40	Kegiatan Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan Perizinan Utilitas Umum	Sumatera Barat	1 Laporan	200.000.000,00	APBD	
01 03 01 40	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SMK3	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan SMK3	Sumatera Barat	1 Laporan	300.000.000,00	APBD	
01 03 01 40	Kegiatan Profil Jasa Konstruksi	Terlaksananya Profil Jasa Konstruksi	Sumatera Barat	1 Laporan	250.000.000,00	APBD	
01 03 01 41	Penyusunan Perda Sistem Manajemen Mutu	Terbentuknya Produk Hukum Daerah Yang Aspiratif, Akomodatif dan Mengacu Kepada Hukum Nasional	Sumatera Barat	1 Perda	500.000.000,00		
01 03 01 42	Penyusunan Perda SMK3	Terbentuknya Produk Hukum Daerah Yang Aspiratif, Akomodatif dan Mengacu Kepada Hukum Nasional	Sumatera Barat	1 Perda	250.000.000,00		
01 03 01 43	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jasa Konstruksi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jasa Konstruksi	Sumatera Barat	1 Laporan	250.000.000,00		
01 08 01 15	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional				21.580.000.000,00		
01 08 01 15 01	Pengendalian dan Operasional UPTD TPA Sampah Regional	Terlaksananya pengendalian operasional UPTD TPA Sampah Regional	Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kab. Padang Pariaman, dan Kota Sawahlunto	4 TPA Sampah Regional	10.000.000.000,00	APBD	
01 08 01 15 02	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur TPA Sampah Regional	Terlaksananya peningkatan pembangunan infrastruktur TPA Sampah Regional	Kota Solok, Kota Payakumbuh, Kab. Padang Pariaman, dan Kota Sawahlunto	22 Paket	8.680.000.000,00	APBD	
01 08 01 15 13	Masterplan Persampahan (DDUB)	Tersedianya Masterplan Persampahan Kab/Kota Sumatera Barat	Sumatera Barat	3 Dokumen	1.500.000.000,00	APBD	
01 08 01 15 14	Penyusunan Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL/UPL) TPA Sampah (DDUB)	Tersedianya Buku Dokumen Lingkungan Kab/Kota Prov. Sumatera Barat	Sumatera Barat	2 Dokumen	200.000.000,00	APBD	
01 08 01 15 15	Stimulan Sarana Persampahan (DDUB)	Tersedianya Sarana Persampahan Kab/Kota Prov. Sumatera Barat	Sumatera Barat	2 Kab/Kota	1.000.000.000,00	APBD	
01 08 01 15 16	Koordinasi dan Pendampingan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pendampingan serta tersedianya aparatur yang terampil	Sumatera Barat	4 Kab/Kota	200.000.000,00	APBD	
01 03 01	Program Pengembangan Kinerja Penyelenggara Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan	Meningkatnya Cakupan Penyelenggaraan PIP2B Provinsi Sumatera Barat			3.850.000.000,00		
01 03 01 01	Penyusunan informasi tentang Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Bahan Bangunan Prov. Sumbar	Tersedianya informasi tentang Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi dan Bahan Bangunan Prov. Sumbar	Provinsi Sumatera Barat	19 Dokumen x 4 Triwulan	500.000.000,00	APBD	
01 03 01 02	Kegiatan Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tim Ahli Bangunan Gedung dan terbentuknya Tim Ahli Bangunan Gedung	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	300.000.000,00	APBD	
01 03 01 03	Fasilitasi Assesmen Bangunan Gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi Bangunan Gedung	Terselenggaranya Fasilitasi assesmen bangunan gedung dan Sertifikasi Laik Fungsi bangunan gedung	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	300.000.000,00	APBD	
01 03 01 04	Pameran dan Seminar Industri Konstruksi dan Bahan Bangunan	Terselenggaranya Pameran dan Seminar Industri Konstruksi dan Bahan Bangunan	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	300.000.000,00	APBD	
01 03 01 05	Penyelenggaraan Layanan Konsultasi Teknis dan Advokasi Serta Tersedianya Data Informasi Teknis Bidang Kecipta Karya	Terselenggaranya Layanan Konsultasi Teknis dan Advokasi serta tersedianya data informasi teknis dan terbentuknya Tim Konsultasi Teknis bidang keciptaan karya	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	300.000.000,00	APBD	
01 03 01 06	Seminar Loka Karya, Sosialisasi Peraturan - Peraturan Perundang - Undangan dan Teknologi Cipta Karya	Terselenggaranya Seminar Loka karya, sosialisasi peraturan-peraturan Undang-dan teknologi Cipta Karya	Provinsi Sumatera Barat	4 Paket	250.000.000,00	APBD	
01 03 01 07	Simulasi Bencana Penyelamatan dan Evakuasi Gempa, Tsunami dan Pasca Bencana	Terlaksananya Simulasi Bencana penyelamatan dan evakuasi Gempa, Tsunami dan Pasca Bencana	Provinsi Sumatera Barat	2 Paket	300.000.000,00	APBD	
01 03 01 08	Pameran dan Lomba Edukasi Bidang Sanitasi SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi	Terselenggaranya Pameran dan Lomba Edukasi Bidang Sanitasi SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi	Provinsi Sumatera Barat	2 Kab/Kota	400.000.000,00	APBD	
01 03 01 09	Pameran Hasil Pembangunan Infrastruktur Bidang ke PU-an Prov. Sumbar	Terselenggaranya Pameran Hasil Pembangunan Infrastruktur Bidang ke PU-an Prov. Sumbar	Provinsi Sumatera Barat	1 Paket	400.000.000,00	APBD	
01 03 01 10	Publikasi Media Massa Radio, Cetak (Buletin Bulan) dan Elektronik Tentang Informasi Teknologi dan Pembangunan Dibidang Cipta Karya	Terselenggaranya Publikasi Media Massa Radio, Cetak (Buletin Bulan) dan Elektronik tentang informasi teknologi dan pembangunan dibidang Cipta Karya	Provinsi Sumatera Barat	19 Kab/Kota	800.000.000,00	APBD	
01 04 01	URUSAN PERUMAHAN				18.150.000.000,00		
01 04 01 15	Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				890.000.000,00		
01 04 01 15 09	Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Sosialisasi Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	1 Dokumen	290.000.000,00	APBD	
01 04 01 15 10	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPPP)	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPPP)	Sumatera Barat	1 Dokumen	200.000.000,00	APBD	
01 04 01 15 13	Updating dan Pengumpulan Data untuk Database Perumahan dan Permukiman	Terupdatenya Database Sektor Perumahan dan Permukiman Kab/Kota Se-Sumatera Barat	Sumatera Barat	1 Dokumen	400.000.000,00	APBD	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				KET.
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
01 04 01 16	Program Pengembangan Permukiman				17.260.000.000,00		
01 04 01 16 07	Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	1 Dokumen	375.000.000,00	APBD	
01 04 01 16 09	Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)	Sumatera Barat	3 Paket	1.935.000.000,00	APBD	
01 04 01 16	Pembangunan PLP2K-BK	Terbangunnya PLP2K-BK	Sumatera Barat	2 Kawasan	7.000.000.000,00	APBD	
	- Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)		Muaro Pingai, Sirukang, Selayo		450.000.000,00		Usulan Kab. Solok
	- Stimulasi Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) Nagari Ujung Gading				500.000.000,00		Pas-Bar
	- Lanjutan Penanganan Kawasan Kumuh kws Koto Baru				3.500.000.000,00		Dharmasraya
	- Lanjutan Penanganan Kawasan Kumuh kws Pulau Punjung				3.500.000.000,00		Dharmasraya
01 05 01	URUSAN PENATAAN RUANG				70.350.000.000,00		
01 05 01 15	Program Perencanaan Penataan Ruang				45.150.000.000,00		
01 05 01 15 05	Revisi RTRW Provinsi Sumatra Barat	Tersedianya Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan Dinamika Pembangunan	Sumatera Barat	100%	1.000.000.000,00	APBD	
01 05 01 15 17	Penyusunan RTR Kawasan Rawan Bencana Tsunami Pantai Barat Sumatra Barat	Terlaksananya Penyusunan RTR Kawasan Rawan Bencana Tsunami Pantai Barat Sumatera Barat	Prov. Sum-Bar	100%	1.500.000.000,00	APBD	
01 05 01 15 18	Penyusunan RTBL Kawasan Main Stadium Lubuk Alung	Terlaksananya Penyusunan RTBL Kawasan Main Stadium Lubuk Alung	Kabupaten Padang Pariaman	100%	600.000.000,00	APBD	
01 05 01 15 19	Penyusunan RTBL Kawasan Nagari Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan	Terlaksananya Penyusunan RTBL Kawasan Nagari Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan	Kabupaten Pesisir Selatan	100%	600.000.000,00	APBD	
01 05 01 15 20	Penyusunan RDTR Koto Baru Kabupaten Tanah Datar	Terlaksananya Penyusunan RDTR Koto Baru Kabupaten Tanah Datar	Kabupaten Tanah Datar	100%	1.000.000.000,00	APBD	
01 05 01 15 21	Penyusunan Zonasi Sistem Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Zonasi Sistem Provinsi	Provinsi Sumatera Barat	100%	1.000.000.000,00	APBD	
	Penyusunan RTBL Kawasan Pulau Punjung				700.000.000,00		Dharmasraya
	Penyusunan RTBL Kawasan Sungai Rumbai				700.000.000,00		Dharmasraya
	Penyusunan RDTR Kawasan Sungai Rumbai				700.000.000,00		Dharmasraya
	Penanganan Kawasan Rawan Bencana Pulau Punjung				10.000.000.000,00		
	Penanganan Kawasan Rawan Bencana Timpeh				10.000.000.000,00		
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Simpang Silago				5.000.000.000,00		(DED Telah Tersedia)
	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kws Sport Center Koto Padang				5.000.000.000,00		(DED TAHUN 2016)
	Pendampingan Penyusunan Revisi RTRW Kab. Sijunjung				800.000.000,00		Sijunjung
	Penyusunan Rencana Zonasi Perairan Danau Maninjau Kec. Tjg. Raya (sbg Kaw. Strategis Provinsi)				400.000.000,00		Agam
	Penyusunan Rencana Induk Mitigasi Bencana Tsunami (Kec. Tanjung Mutiara)				400.000.000,00		Agam
	RTBL Kawasan Linggai				400.000.000,00		Agam
	Penyusunan RTBL Kawasan Koridor Jl. Soekarno Hatta				1.000.000.000,00		Kota Bukittinggi
	Penyusunan RTBL Kawasan Koridor Kereta Api Jl. Havid Jalil - Soekarno Hatta)				1.000.000.000,00		Kota Bukittinggi
	Penyusunan RTBL Kawasan Koridor Jl. By Pass				1.000.000.000,00		Kota Bukittinggi
	Penyusunan RTBL Koridor Kaw. Panorama Baru				750.000.000,00		Kota Bukittinggi
	Penyusunan RTBL Kawasan Bersejarah Pasar Atas dan sekitarnya				1.100.000.000,00		Kota Bukittinggi
	Pendampingan Penyusunan Revisi/PK RTRW Kab. Solok Selatan				500.000.000,00		Solok Selatan
01 05 01 16	Program Pengaturan dan Pengawasan			100%	2.500.000.000,00		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017				KET.
			LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
01 05 01 16 08	Proses Legalisasi Rencana Kawasan Strategis Provinsi (KSP)	Tersedianya perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat dengan	Sumatera Barat	100%	2.500.000.000,00	APBD	
	- Kawasan Pasapalapa (Metropolitan Padang)		Kota Padang	100%	1.250.000.000,00		
	- Kawasan Danau Singkarak		Kab. Solok	100%	1.250.000.000,00		
01 05 01 17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			100%	22.700.000.000,00		
01 05 01 17	Pembangunan fisik kawasan Rest Area	Terlaksananya Pembangunan fisik kawasan Rest Area	Sumatera Barat	100%	22.500.000.000,00	APBD	
	- Rest Area Kawasan Bukit Gado-Gado (Jalan Nipah - Teluk Bayur)				5.000.000.000,00		
	- Rest Area Kawasan Taman Hutan Raya Bung Hatta (Jalan Nasional Padang - Solok)				5.000.000.000,00		
	- Rest Area Kawasan Malalak (Jalan Sicincin - Malalak)				2.500.000.000,00		
	- Rest Area Kawasan Sumbai Rumbai (KSP Prov. Sumatera Barat)				10.000.000.000,00	Dharmasraya	
01 05 01 17	Monitoring pelaksanaan Perda RTRW dan Pengendalian Teknis SPM Penataan Ruang Provinsi Sumatra Barat	Terlaksananya Monitoring pelaksanaan Perda RTRW dan Pengendalian Teknis SPM Penataan Ruang Provinsi Sumatra Barat	Sumatera Barat		200.000.000,00		
01 20 01	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAH UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN				330.000.000,00		
01 20 01 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah				330.000.000,00		
01 20 01 17 52	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi	Meningkatnya Kinerja UPTD Laboratorium Kebinamargaan	Sumatera Barat	100%	330.000.000,00	APBD	

Padang, Mei 2016
Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman
Provinsi Sumatera Barat

Ir. SUPRPATO, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/ d
Nip. 19561219 198511 1 001

L A M P I R A N